

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Penelitian

Perkembangan ilmu pengetahuan sangat ditentukan oleh perkembangan dunia pendidikan, dimana dunia pendidikan mempunyai peran yang sangat strategis dalam menentukan arah maju mundurnya mutu pendidikan. Hal ini bisa dirasakan, yaitu ketika sebuah lembaga pendidikan dalam penyelenggaraan pendidikannya itu dengan cara yang benar-benar bagus, maka akan dapat dilihat mutunya. Berbeda dengan lembaga pendidikan yang melaksanakan pendidikan hanya dengan sekedarnya maka hasilnya pun biasa-biasa saja.

Salah satu permasalahan pendidikan yang dihadapi oleh bangsa Indonesia adalah rendahnya mutu pendidikan pada setiap jenjang dan satuan pendidikan, khususnya pendidikan dasar dan menengah. Berbagai usaha telah dilakukan untuk meningkatkan mutu pendidikan nasional, antara lain melalui berbagai pelatihan dan peningkatan kompetensi guru, pengadaan buku dan alat pelajaran, perbaikan sarana dan prasarana pendidikan, dan peningkatan mutu manajemen sekolah. Namun demikian, berbagai indikator mutu pendidikan belum menunjukkan peningkatan yang berarti. Sebagian sekolah, terutama di kota-kota besar menunjukkan peningkatan mutu pendidikan yang cukup menggembirakan, namun sebagian besar lainnya di daerah pedesaan masih memprihatinkan.

Pendidikan merupakan salah satu pilar kehidupan bangsa. Masa depan suatu bangsa bisa diketahui melalui sejauh mana komitmen masyarakat, bangsa ataupun negara dalam menyelenggarakan pendidikan nasional. Oleh karena itu, pendidikan menjadi faktor utama atau penentu bagi masa depan bangsa. Tujuan pendidikan nasional dinyatakan dalam Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2003 pasal 3 bertujuan untuk berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab.

Kaitannya dengan pendidikan, Tilaar dalam Mulyasa (2007:124), pendidikan nasional dewasa ini dihadapkan pada empat krisis pokok, yakni berkaitan dengan mutu, relevansi atau efisiensi eksternal, elitisme, dan manajemen. Lebih lanjut dikemukakan bahwa sedikitnya ada enam masalah pokok yang terkait dengan sistem pendidikan nasional: 1) menurunnya akhlak dan moral peserta didik, 2) pemerataan kesempatan belajar, 3) masih rendahnya efisiensi internal sistem pendidikan, 4) status kelembagaan, 5) manajemen pendidikan yang tidak sejalan dengan pembangunan nasional, dan 6) sumber daya yang tergolong minim dan belum profesional.

Upaya untuk meningkatkan mutu pendidikan tidak akan pernah berhenti dan selesai. Berbagai konsep dan wawasan baru akan terus berproses seiring dengan berkembangnya pengetahuan dan teknologi. Konsep dan wawasan baru itu diharapkan dapat meningkatkan mutu sumber daya manusia agar mampu bersaing

secara global. Dengan demikian persoalan peningkatan mutu pendidikan sangat perlu dikaji dan diperjuangkan.

Mereliasisasikan perjuangan dalam meningkatkan mutu pendidikan maka perlu adanya pembenahan dari segi sumber daya manusianya, lembaga penyelenggara pendidikannya seperti SD/MI, SMP/MTS, SMA/MA, SMK/MAK, dan perguruan tinggi dan semuanya itu perlu didukung oleh sumber daya pendidik yang layak. Sumber daya pendidikan itu antara lain: tenaga ahli atau guru, manajemen, kurikulum, sarana dan prasarana, serta dana yang diadakan dan didayagunakan oleh pemerintah, masyarakat, keluarga, peserta didik baik secara sendiri-sendiri maupun dalam bentuk kerjasama.

Pemberian otonomi pendidikan yang luas pada sekolah merupakan kepedulian pemerintah terhadap gejala-gejala yang muncul di masyarakat serta upaya peningkatan mutu pendidikan secara umum. Pemberian otonomi ini menuntut pendekatan manajemen yang lebih kondusif di sekolah agar dapat mengakomodasi seluruh keinginan sekaligus memberdayakan berbagai komponen masyarakat secara efektif, guna mendukung kemajuan dan sistem yang ada di sekolah. Dalam kerangka inilah, Manajemen Berbasis Sekolah (MBS) tampil sebagai alternatif paradigma baru manajemen pendidikan yang ditawarkan.

Manajemen Berbasis Sekolah (MBS) merupakan suatu konsep yang menawarkan otonomi pada sekolah untuk menentukan kebijakan sekolah dalam rangka meningkatkan mutu, efisiensi dan pemerataan pendidikan agar dapat mengakomodasi keinginan masyarakat dan pemerintah. Dalam pelaksanaan Manajemen Berbasis Sekolah (MBS), peran serta dan dukungan masyarakat, baik

dalam pengelolaan dan penyelenggaraan pendidikan sangat dibutuhkan. Untuk menampung peran serta masyarakat dalam dunia pendidikan, maka dibentuklah Komite Sekolah.

Pengertian Komite Sekolah menurut Permendikbud Nomor 75 Tahun 2016 adalah sebuah badan independen yang memiliki susunan anggota terdiri komunitas sekolah, orangtua/wali peserta didik, dan juga tokoh masyarakat yang peduli terhadap dunia pendidikan. Anggota-anggota dan pengurus Komite Sekolah diharapkan memahami dan mengerti tentang dunia pendidikan, sehingga dapat mendukung langkah sekolah untuk mewujudkan tujuan pendidikan. Ketua Komite juga sebaiknya dipilih diutamakan dari elemen orangtua/wali siswa aktif. Artinya, semestinya Ketua Komite Sekolah dipilih dari orangtua/wali yang anaknya masih aktif sebagai siswa di sekolah itu.

Keberadaan komite sekolah ini telah mengacu kepada Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2000 tentang Program Pembangunan Nasional (Propenas) 2000-2004, dalam rangka pemberdayaan dan peningkatan peran serta masyarakat perlu dibentuk dewan pendidikan di tingkat kabupaten/kota, dan komite sekolah di tingkat satuan pendidikan. Amanat rakyat ini sejalan dengan konsepsi desentralisasi pendidikan, baik di tingkat kabupaten/kota maupun di tingkat sekolah. Amanat rakyat dalam Undang-Undang tersebut telah ditindaklanjuti dengan keputusan Permendikbud Nomor 75 Tahun 2016 tentang Komite Sekolah.

Komite sekolah memiliki tugas seperti halnya badan lain yang ada dalam susunan organisasi sekolah. Tugas tersebut tentunya juga berhubungan dengan upaya peningkatan kelancaran pendidikan di sekolah. Dalam menjalankan tugasnya

di sekolah, komite sekolah menjalin komunikasi dengan kepala sekolah sebagai orang yang memiliki jabatan tertinggi dari pihak sekolah. Berpedoman pada Permendikbud Nomor 75 Tahun 2016 tentang Acuan Pembentukan Komite Sekolah, dinyatakan bahwa tugas utama dari komite sekolah yaitu membantu upaya untuk meningkatkan dan menyalurkan kelancaran penyelenggaraan pendidikan di sekolah, baik langsung maupun tidak langsung, dengan mendayagunakan kemampuan yang ada pada orang tua, masyarakat, dan lingkungan, sehingga tercipta suasana dan kondisi yang transparan, akuntabel, dan demokratis. Pendayagunaan kemampuan yang ada tidak hanya bersifat material keuangan, tetapi juga bersifat non material seperti berperan dalam memberikan pertimbangan, mendukung, mengontrol, dan mediator atau penyalur pemikiran di sekolah.

Menurut Permendikbud Nomor 75 Tahun 2016 Pasal 2, Komite Sekolah berperan dalam meningkatkan kualitas pelayanan pendidikan. Fungsi Komite Sekolah, dijalankan secara professional, mandiri, demokratis, akuntabel, dan gotong royong. Sunil Kumar (2016:3878) menyebutkan fungsi Komite Sekolah adalah memantau kinerja sekolah, memberikan pertimbangan terhadap perencanaan pengembangan sekolah, meninjau bantuan keuangan dari pemerintah, dan melaksanakan tugas dan tanggungjawab yang telah ditetapkan.

Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 menyatakan tentang fungsi dan tugas Dewan Pendidikan dan Komite Sekolah yang termuat pada Pasal 196 ayat 1 yaitu Komite Sekolah/Madrasah bertugas dan bertanggungjawab untuk menumbuh kembangkan kualitas pelayanan pendidikan. Dalam menjalankan fungsinya, Komite Sekolah/Madrasah mendengarkan segala masukan dari

masyarakat berupa keluhan, kritik, saran, dan juga aspirasi dari masyarakat. Komite Sekolah/Madrasah juga melakukan tindaklanjut terkait peningkatan mutu pendidikan di satuan pendidikan. Tidak mengabaikan masukan-masukan yang bertujuan untuk memajukan sekolah. Berdasarkan pendapat dari para ahli, dapat dianalisis bahwa indikator fungsi komite sekolah adalah meningkatkan mutu pelayanan pendidikan, memonitor kinerja sekolah, merekomendasikan rencana pengembangan sekolah, dan memantau bantuan dana dari pemerintah.

Dengan demikian komite sekolah merupakan sebuah badan mandiri yang mewadahi peran serta masyarakat dalam rangka meningkatkan mutu, pemerataan, dan efisiensi pengelolaan pendidikan di satuan pendidikan baik pada pendidikan prasekolah, jalur pendidikan sekolah, maupun jalur pendidikan luar sekolah. Untuk penamaan badan disesuaikan dengan kondisi dan kebutuhan daerah masing-masing satuan pendidikan, seperti Komite Sekolah, Majelis Madrasah, Majelis Sekolah, Komite TK, atau nama-nama lain yang disepakati bersama.

Adapun tujuan komite sekolah, yaitu: 1). Mewadahi dan menyalurkan aspirasi dan prakarsa masyarakat dalam melahirkan kebijakan operasional dan program pendidikan di satuan pendidikan; 2). Meningkatkan tanggung jawab dan peran masyarakat dalam penyelenggaraan pendidikan; dan 3). Menciptakan suasana dan kondisi transparan, akuntabel, dan demokratis dalam penyelenggaraan dan pelayanan yang bermutu disatuan pendidikan.

Keberadaan dewan pendidikan dan komite sekolah memang dipandang strategis sebagai wahana untuk meningkatkan mutu pendidikan. Beberapa kalangan masyarakat serta pakar dan pengamat pendidikan yang diundang untuk memberikan

masuk dalam upaya meningkatkan mutu pendidikan, pada umumnya sangat antusias dan mendukung sepenuhnya gagasan pembentukan dewan pendidikan dan komite sekolah. Untuk dapat memberdayakan dan meningkatkan peran serta masyarakat, sekolah harus bisa membina kerjasama dengan orang tua dan masyarakat, menciptakan suasana kondusif dan menyenangkan bagi peserta didik dan warga sekolah. Itulah sebabnya paradigma MBS mengandung makna sebagai manajemen partisipatif yang melibatkan peran serta masyarakat sehingga semua kebijakan dan keputusan yang diambil adalah kebijakan dan keputusan bersama, untuk mencapai keberhasilan bersama. Partisipasi ini perlu dikelola dan dikoordinasikan dengan baik agar lebih bermakna bagi sekolah, terutama dalam peningkatan mutu dan efektifitas pendidikan lewat suatu wadah yaitu dewan pendidikan di tingkat kabupaten/kota dan komite sekolah di setiap satuan pendidikan.

Namun demikian tidak semua fungsi dari komite sekolah yang ada di setiap organisasi dapat berjalan dengan baik, banyak faktor yang menyebabkan hal ini terjadi. Salah satu faktor yang menyebabkan kinerja komite sekolah kurang maksimal misalnya kurangnya kerjasama dan komunikasi yang dilakukan antara pihak sekolah dengan komite sekolah. Hal ini membuat sebagian besar kepala sekolah yang ada di setiap sekolah pada umumnya cenderung terlalu dominan dalam mengambil keputusan terkait pembuatan program sekolah, karena merasa bahwa komite sekolah yang ada di sekolahnya tidak memberikan pengaruh yang besar dalam upaya penyelenggaraan pendidikan di sekolah.

Mengingat komite sekolah merupakan sebuah badan mandiri yang mewadahi peran serta masyarakat dalam rangka meningkatkan mutu, pemerataan, dan efisiensi pengelolaan pendidikan di satuan pendidikan, maka berkaitan pula dengan mutu sekolah. Berdasarkan hasil observasi melalui studi pendahuluan pada tanggal 23 Mei 2023 di SD Negeri Kertajaya 03 dan SD Negeri Kertajaya 04 Kecamatan Gandrungmangu, ketercapaian fungsi komite sekolah disajikan pada tabel sebagai berikut:

Table 1.1
Rata-rata Ketercapaian Fungsi Komite Sekolah
SDN Kertajaya 03 dan SDN Kertajaya 04 Kecamatan Gandrungmangu
Tahun 2022

No.	Fungsi Komite Sekolah	Target	Ketercapaian
1	Meningkatkan mutu pelayanan pendidikan.	100%	70%
2	Memonitor kinerja sekolah.	100%	75%
3	Merekomendasikan rencana pengembangan sekolah.	100%	70%
4	Memantau bantuan dana dari pemerintah.	100%	80%
	Rata-rata	100%	73%

Sumber : SDN Kertajaya 03 dan SDN Kertajaya 04 Kec. Gandrungmangu, 2023

Berdasarkan tabel 1.1 di atas dapat dijelaskan bahwa rata-rata ketercapaian fungsi komite sekolah ditinjau dari meningkatkan mutu pelayanan pendidikan sebesar 70%, memonitor kinerja sekolah sebesar 75%, merekomendasikan rencana pengembangan sekolah sebesar 70%, dan memantau bantuan dana dari pemerintah sebesar 80%. Dengan demikian rata-rata ketercapaian fungsi komite sekolah di SDN Kertajaya 03 dan SDN Kertajaya 04 Kecamatan Gandrungmangu Kecamatan Gandrungmanu yang dilaksanakan baru mencapai rata-rata 73% dari target yang

diharapkan. Sehingga fungsi komite sekolah masih dirasa belum optimal sehingga perlu ditingkatkan lagi.

Sekolah juga sebagai instansi pendidikan pada dasarnya bertujuan untuk mempersiapkan anak didik menghadapi kehidupan masa depan yaitu dengan cara mengembangkan potensi yang dimilikinya. Usaha tersebut akan menjadi optimal jika sekolah sebagai pusat belajar formal bagi peserta didik dapat mengembangkan proses belajar mengajar dengan baik beserta seluruh aspek yang mempengaruhinya seperti sarana dan prasarana, situasi atau lingkungan yang kondusif dan faktor-faktor lainnya, termasuk penyusunan rencana-rencana pembelajaran.

Baharuddin dan Esa (2007:16) mengemukakan proses belajar adalah serangkaian aktivitas yang terjadi pada pusat saraf individu yang belajar. Proses belajar dan hasilnya dapat diamati dari perubahan tingkah laku yang berbeda dari yang sebelumnya pada diri seseorang baik dalam hal pengetahuan, efektif maupun psikomotor. Secara garis besar, proses belajar dipengaruhi oleh dua faktor, yaitu faktor internal maupun eksternal. Faktor-faktor internal meliputi faktor fisiologis, yaitu jasmani dan faktor psikologis, yaitu kecerdasan atau intelegensi siswa, motivasi, minat, sikap, bakat. Faktor-faktor eksternal meliputi lingkungan alamiah dan lingkungan sosial budaya, sedangkan lingkungan nonsosial atau instrumental, yaitu kurikulum, program, fasilitas belajar, dan guru.

Dari beberapa faktor dan tujuan pendidikan, maka sekolah perlu berkolaborasi dengan komite sekolah dalam menyediakan fasilitas sekolah atau fasilitas belajar yang dapat menunjang terlaksananya proses pendidikan dan peningkatan kualitas pendidikan. Fasilitas tersebut dapat berupa sarana prasarana

yang menunjang dan dapat membantu peserta didik untuk menemukan berbagai pengetahuan yang dibutuhkan serta mendorong peserta didik untuk aktif melibatkan diri dalam proses pembelajaran sesuai dengan standar pendidikan nasional. Selain menyediakan fasilitas belajar, sekolah juga perlu menciptakan lingkungan yang mendukung dalam proses pembelajaran sehingga peserta didik dapat belajar dengan baik dan dapat meningkatkan hasil belajarnya.

Dengan demikian, terpenuhinya fasilitas belajar seperti sarana prasarana dalam belajar dan adanya kondisi lingkungan belajar yang baik dapat mendukung proses pembelajaran sehingga kegiatan belajar mengajar (KBM) berlangsung secara efektif dan efisien. Pembelajaran yang efektif dan efisien dapat meningkatkan hasil belajar siswa. Terlebih lagi dewasa ini semakin dirasakan betapa pentingnya peranan fasilitas dan lingkungan yang baik dalam pembelajaran agar tercapai tujuan pendidikan yang diharapkan. Namun, pentingnya keberadaan fasilitas dan lingkungan yang baik, seringkali terabaikan. Hal ini, terbukti dengan seringnya pemberitaan baik media cetak maupun media elektronik mengenai potret buram pendidikan tanah air. Dalam pemberitaan tersebut seringkali mengeluhkan adanya bangunan sekolah yang roboh atau rusak dan ironisnya yang kurang mendapat perhatian dari pemerintah baik pemerintah setempat maupun pemerintah pusat.

Hal tersebut tentunya akan sangat menghambat proses belajar karena proses belajar tidak dapat berlangsung dengan baik dan lancar sesuai dengan yang diharapkan. Jika proses belajar tidak dapat berlangsung dengan baik dan lancar, maka tujuan dari pembelajaran juga tidak akan dapat tercapai dengan baik. Hal ini

juga akan berdampak pada hasil siswa yang nantinya merujuk pada kualitas lembaga sekolah dan pada akhirnya pemerintah. Fasilitas sekolah merupakan faktor yang sama-sama berasal dari luar diri siswa yang biasanya berpengaruh secara tidak langsung terhadap peningkatan hasil siswa. Akan tetapi, tidak tersedianya fasilitas sekolah yang baik dapat menjadi masalah dan penghambat proses belajar dan pencapaian hasil belajar yang baik oleh karena keterabaian ketersediaannya. Pencapaian hasil belajar yang baik menunjukkan keberhasilan dalam proses pembelajaran, begitu juga sebaliknya tidak tercapainya hasil belajar yang baik menunjukkan kurang berhasilnya dalam proses pembelajaran.

Selanjutnya di bawah ini disajikan keadaan fasilitas sekolah berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 BAB VII tentang standar sarana dan prasarana seperti pada tabel berikut ini:

Tabel 1.2
Keadaan Fasilitas Sekolah
SD Negeri Kertajaya 03 dan SD Negeri Kertajaya 04 Kec. Gandrungmangu
Tahun 2022

No	Fasilitas	SDN Kertajaya 03		SDN Kertajaya 04	
		Baik	Kurang Baik	Baik	Kurang Baik
1.	Ruang kelas		✓		✓
2.	Ruang perpustakaan		✓		✓
3.	Laboratorium IPA		✓		✓
4.	Ruang kepala sekolah	✓		✓	
5.	Ruang guru		✓	✓	
6.	Tempat beribadah		✓	✓	
7.	Ruang UKS	✓			✓
8.	Jamban	✓		✓	
9.	Gudang		✓		✓
10.	Ruang sirkulasi	✓		✓	
11.	Tempat bermain/berolahraga	✓		✓	

Sumber: SDN Kertajaya 03 dan SDN Kertajaya 04 Kec. Gandrungmangu, 2023

Dari tabel 1.2 menunjukkan bahwa ada beberapa fasilitas yang kurang memadai, atau bahkan tidak ada. Sebagaimana ruang kelas, ruang perpustakaan, dan gudang yang kurang baik kondisinya, hal ini menyebabkan pendidik dan peserta didik merasa kurang nyaman saat pembelajaran dan terbatasnya fasilitas perpustakaan sebagai sumber pengetahuan. Masalah-masalah ini merupakan cerminan kurangnya fasilitas sekolah sehingga akan berdampak pada kreatifitas pendidik untuk mengelola semua sumber daya yang ada di sekolah secara efektif dan efisien untuk mencapai tujuan pendidikan. Dengan demikian perlu adanya peningkatan fasilitas sekolah sesuai dengan standar sarana dan prasarana. Peningkatan fasilitas sekolah tersebut dibutuhkan kerjasama sekolah dan komite untuk mengoptimalkan semua potensi sekolah.

Berdasarkan pada uraian di atas, maka penulis ingin membahas masalah dengan judul **“Studi Tentang Fungsi Komite Sekolah Dalam Meningkatkan Fasilitas Sekolah Di SD Negeri Kertajaya 03 Dan SD Negeri Kertajaya 04 Kecamatan Gandrungmangu Kabupaten Cilacap”**.

1.2. Fokus Penelitian

Salah satu permasalahan pendidikan yang dihadapi oleh bangsa Indonesia adalah rendahnya mutu pendidikan pada setiap jenjang dan satuan pendidikan, khususnya pendidikan dasar dan menengah. Pemberian otonomi pendidikan yang luas pada sekolah merupakan kepedulian pemerintah terhadap gejala-gejala yang muncul di masyarakat serta upaya peningkatan mutu pendidikan secara umum. Pemberian otonomi ini menuntut pendekatan manajemen yang lebih kondusif di sekolah agar dapat mengakomodasi seluruh keinginan sekaligus memberdayakan

bagai komponen masyarakat secara efektif, guna mendukung kemajuan dan sistem yang ada di sekolah. Manajemen Berbasis Sekolah (MBS) merupakan suatu konsep yang menawarkan otonomi pada sekolah untuk menentukan kebijakan sekolah dalam rangka meningkatkan mutu, efisiensi dan pemerataan pendidikan agar dapat mengakomodasi keinginan masyarakat dan pemerintah. Dalam pelaksanaan Manajemen Berbasis Sekolah (MBS), peran serta dan dukungan masyarakat, baik dalam pengelolaan dan penyelenggaraan pendidikan sangat dibutuhkan. Untuk menampung peran serta masyarakat dalam dunia pendidikan, maka dibentuklah komite sekolah. Berdasarkan pendapat dari para ahli, dapat dianalisis bahwa indikator fungsi komite sekolah adalah meningkatkan mutu pelayanan pendidikan, memonitor kinerja sekolah, merekomendasikan rencana pengembangan sekolah, dan memantau bantuan dana dari pemerintah.

Dengan demikian komite sekolah merupakan sebuah badan mandiri yang mewadahi peran serta masyarakat dalam rangka meningkatkan mutu, pemerataan, dan efisiensi pengelolaan pendidikan di satuan pendidikan.

Berdasarkan latar belakang penelitian di atas, maka yang menjadi fokus penelitian sebagai berikut:

1. Tidak semua fungsi dari komite sekolah yang ada di setiap organisasi dapat berjalan dengan baik, banyak faktor yang menyebabkan hal ini terjadi yang menyebabkan kinerja komite sekolah kurang maksimal.
2. Kurang optimalnya fasilitas sekolah sekolah yaitu sarana dan prasarana sehingga akan berpengaruh terhadap nuansa pembelajaran sekolah.

3. Kreatifitas pendidik untuk mengelola semua sumber daya yang ada di sekolah belum diterapkan secara efektif dan efisien untuk mencapai tujuan pendidikan..

1.3 Rumusan Masalah

Berdasarkan fokus penelitian di atas maka rumusan masalah penelitian ini adalah sebagai berikut.

1. Bagaimana fungsi komite sekolah dalam meningkatkan fasilitas sekolah di SD Negeri Kertajaya 03 dan SD Negeri Kertajaya 04 Kecamatan Gandrungmangu Kabupaten Cilacap?
2. Apa saja hambatan yang dihadapi dalam fungsi komite sekolah untuk meningkatkan fasilitas sekolah di SD Negeri Kertajaya 03 dan SD Negeri Kertajaya 04 Kecamatan Gandrungmangu Kabupaten Cilacap?
3. Bagaimana upaya yang dilakukan untuk mengatasi hambatan dalam fungsi komite sekolah untuk meningkatkan fasilitas sekolah di SD Negeri Kertajaya 03 dan SD Negeri Kertajaya 04 Kecamatan Gandrungmangu Kabupaten Cilacap?

1.4 Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis dan mendeskripsikan:

1. Fungsi komite sekolah dalam meningkatkan fasilitas sekolah di SD Negeri Kertajaya 03 dan SD Negeri Kertajaya 04 Kecamatan Gandrungmangu Kabupaten Cilacap.

2. Hambatan yang dihadapi dalam fungsi komite sekolah untuk meningkatkan fasilitas sekolah di SD Negeri Kertajaya 03 dan SD Negeri Kertajaya 04 Kecamatan Gandrungmangu Kabupaten Cilacap.
3. Upaya yang dilakukan untuk mengatasi hambatan dalam fungsi komite sekolah untuk meningkatkan fasilitas sekolah di SD Negeri Kertajaya 03 dan SD Negeri Kertajaya 04 Kecamatan Gandrungmangu Kabupaten Cilacap.

1.5 Kegunaan Penelitian

1.5.1 Kegunaan Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan bermanfaat sebagai kontribusi terhadap wawasan ilmu pengetahuan administrasi pendidikan terkait dengan fungsi komite sekolah dalam meningkatkan fasilitas sekolah.

1.5.2 Kegunaan Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai bahan masukan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Cilacap dalam fungsi komite sekolah dalam meningkatkan fasilitas sekolah.